

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIAYAH TERHADAP
KEWENANGAN QUASI PERADILAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MENURUT UU NO. 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



ROBI ARIANSYAH

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
KEWENANGAN QUASI PERADILAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MENURUT UU NO. 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



Skripsi

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana hukum (SH)

Oleh:

Robi Ariansyah

NIM: 1711150058

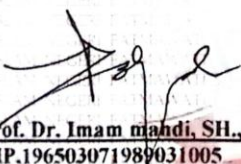
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Robi Ariansyah, NIM 1711150058 dengan judul **"TINJAUAN FIKH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN QUASI PERADILAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) MENURUT UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM"**. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 4 Oktober 2023 M
1444 H

Pembimbing I



Prof. Dr. Imam mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Pembimbing II



Ifansyah putra, M.Sos.
NIP.199303312019032010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Robi Ariansyah NIM. 1711150058 yang berjudul
"Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan
Quasi Peradilan Badan Pengawasan Pemilihan Umum
(BAWASLU) Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum". Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : senin

Tanggal : 16 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu
Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2023 M
1444 H


Dekan


Dr. Suwarjin, S.Ag., MA

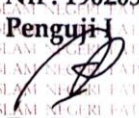
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

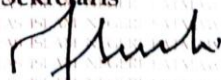
Ketua


Prof. Imam Mahdi, Sh., MH.
NIP. 196205031986031004

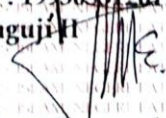
Penguji-I


Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Sekretaris


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 19930312019031005

Penguji-II


Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 04 Oktober 2023 M
18 Rabiul Awal 1444 H
Mahasiswa yang menyatakan


KUBI ARIANSYAH
NIM. 1711150058

MOTTO

Kita hidup di zona nyaman dalam kondisi tidak aman

Kebaikan akan melahirkan kebahagiaan

Aku adalah ketidaktahuan



PERSEMBAHAN

Puja dan puji syukur kehadiran Tuhan maha kuasa Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah mengkaruniaai akal, nurani serta nafsu sebagai bekal manusia mengelola bumi sehingga penulis mampu untuk mempersembahkan sebuah karya ini kepada:

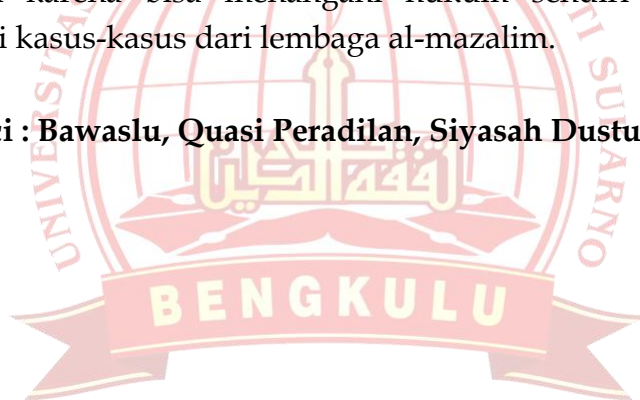
1. Muhammad S.A.W yang senantiasa pembawa risalah serta misi kemanusiaan hingga cinta kasih mewarnai kehidupan kemanusiaan termasuk kepada penulis.
2. Darmani, ibu, perempuan yang istimewa, perempuan yang selalu memberikan kasih sayang, kelembutan, perempuan yang melahirkan kedunia, mengorbankan seluruh jiwanya dari lahir sampai menna, cintaku kepadanya tidak akan pernah pudar sampai tutup usia
3. Baharudin, ayah yang mengenalku dengan semesta
4. Roki Andika, kakak yang paling mengenalkanku tentang arti dari semangatnya hidup, yang paling meninspirasi memberi kemanfaatan untuk semua insan
5. Himpunan ku terkhusus keluarga besar komisariat syariah, tempat yang telah memberikanku ruang dalam pengetahuan
6. Alam Syahri, M aziz amrullah, Andika Aprilyanto Riki Alamin sebagai sahabat berpikir dan pendorong karya ini terselesaikan.
7. Untuk semua manusia yang tidak berhenti berjuang terhadap peningkatan kualitas kemanusiaan.

ABSTRAK

Robi Ariansyah NIM. 1711150058, Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini double fungsi yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas suatu kejadian atau kasus pelanggaran administrasi. Padahal kemudian lembaga ini juga menyidangkan kasus tersebut. Jelas penilaiannya (ketika menjalankan fungsi pengawasan) akan memengaruhi putusnya (ketika menjadi lembaga peradilan). Oleh sebab itu penelitian ini menedapati dua rumusan masalah. Pertama bagaimana kewenangan quasi peradilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap kewenangan quasi peradilan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Jenis penelitian yang dipilih penulis dari ketiga jenis penelitian tersebut dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundangundangan dan bahan pustaka. Hasil penelitian skripsi ini bahwa Bawaslu memiliki fungsi penegakan hukum pemilu, sekaligus kewenangan untuk mengadili dengan putusan adjudikasi terhadap sengketa pemilu. Namun dalam fungsi penegakan hukum pemilu, saat ini Bawaslu masih berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, di samping Bawaslu juga dapat menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian Tinjauan fiqh siyasah sama dengan

kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim. Bawaslu termasuk dalam bidang siyasah tashri'iyah yaitu salah satu bagian dari fiqh siyasah dusturiyah yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, dan tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah siyasah tashri'iyah karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat. Kesimpulan penelitian ini apa Bawaslu memiliki urgensi untuk ditransformasikan menjadi peradilan khusus pemilu, dikarenakan realitas hingga saat ini yang menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan fungsi quasi peradilan. kemudian Tinjauan fiqh siyasah sama dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga al-mazalim.

Kata Kunci : Bawaslu, Quasi Peradilan, Siyasah Dusturiyah

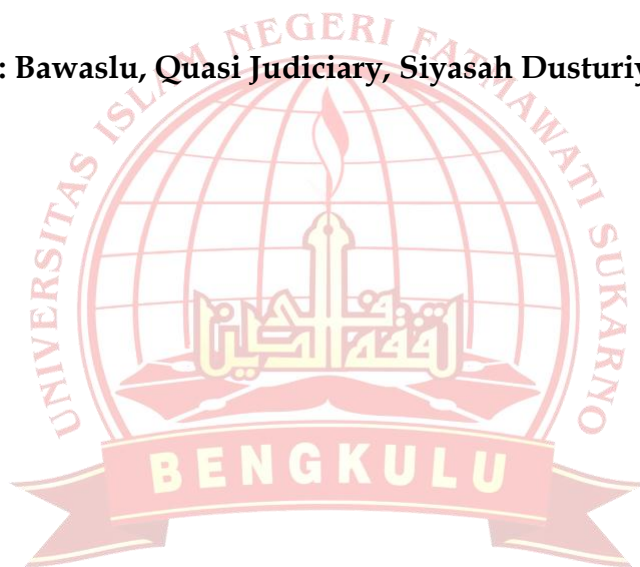


ABSTRACT

Bawaslu is now not just a supervisory institution but also a judicial institution, or at least carries out judicial functions, so that procedures for resolving administrative violations also follow the trial model. Bawaslu carries out judicial functions, but at the same time also carries out supervisory functions. This is a double function that can give rise to a conflict of interest. As an election supervisor, Bawaslu already has a certain assessment of an incident or case of administrative violation. However, this institution also tried the case. It is clear that his judgment (when carrying out a supervisory function) will influence his decision (when he becomes a judicial institution). Therefore, this research found two problem formulations. First, what is the quasi-judicial authority of the general election supervisory body (bawaslu) according to law number 7 of 2017 concerning general elections. What is Fiqh Siyasah Dusturiyah's view of the quasi-judicial authority of the general election supervisory body (bawaslu) according to law number 7 of 2017 concerning general elections , The type of research chosen by the author from the three types of research in this research is normative legal research. Normative legal research is often called doctrinal research, namely the object of research is statutory documents and library materials. The results of this thesis research show that Bawaslu has the function of enforcing election law, as well as the authority to adjudicate election disputes. However, in the function of enforcing election law, currently Bawaslu is still coordinating with the police and prosecutor's office, besides Bawaslu can also receive reports from the public regarding election criminal violations. Then the review of siyasah fiqh is the same as the regional authority of al-hisbah tafwidiyah because it can handle its own law and can handle cases from the al-mazalim institution. Bawaslu is included in the field of siyasah tashri'iyah, which is one part of the fiqh siyasah dusturiyah which discusses or examines the relationship between government institutions and

society, and it does not rule out the possibility that institutions such as the KPU and Bawaslu also enter the realm of *siyasah tashri'iyah* because the function of these institutions is not others are also for the benefit of the people. The conclusion of this research is that Bawaslu has an urgency to be transformed into a special election court, because the current reality shows that Bawaslu has carried out a quasi-judicial function. then the review of *siyasah fiqh* is the same as the regional authority of *al-hisbah tafwidiyah* because it can handle its own law and can handle cases from the *al-mazalim* institution.

Keywords: Bawaslu, Quasi Judiciary, Siyasah Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim.

Alhamdulillah kalimat mulia yang selalu kita lafadzkan sebagai bentuk puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT zat yang maha mulia, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan tuntas. Dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Uu No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk membawa risalah serta misi kemanusiaan sehingga manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Prof. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ifansyah Putra, M.Sos. selaku Pembimbing II

5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

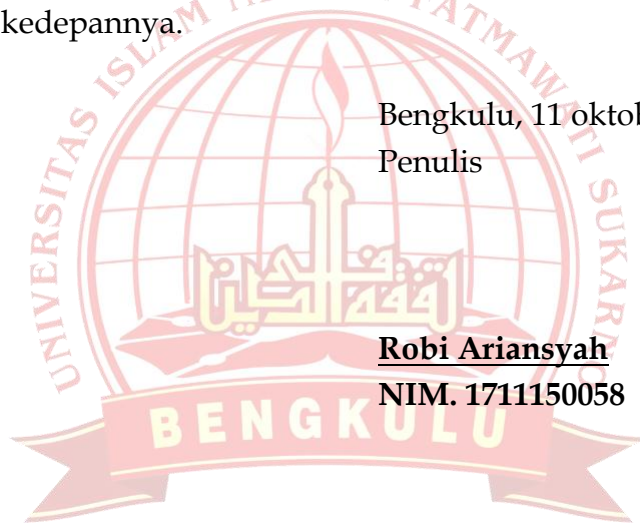
Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 11 oktober 2023

Penulis

Robi Ariansyah

NIM. 1711150058



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTO.....	ii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Kewenangan dan Penegakkan Hukum.....	20
B. Lembaga Quasi-Yudisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	24
C. Badan Pengawas Pemilihan Umum	27
D. Tinjauan Fiqh Siyasah	44
E. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	54
B. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Quasi Peradilan Badan Pengawas Pemilihan Umum	

(Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	73
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



